



Beli Lahan RS Sumber Waras Pemprov Hemat Rp52 Miliar

JAKARTA (Pos Kota) - Pembelian lahan Rumah Sakit (RS) Sumber Waras seluas 3,7 hektar oleh Pemprov DKI dinilai sudah sesuai prosedur. "Pembelian sudah benar, bahkan kami bisa menghemat Rp52 miliar dari nilai penjualan Rp800 miliar," ujar Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BP-KAD) DKI, Heru Budi Hartono, Selasa (11/8).

Penghematan puluhan miliar rupiah itu karena DKI tidak ikut menanggung bea perolehan hak tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar 5 persen dari harga total dan juga tidak bayar notaris. Jika ada pihak yang mempermasalahkan besaran nilai jual obyek pajak (NJOP) tak punya dasar kuat.

Hal ini dikatakan Heru menanggapi soal penilaian BPK terhadap pembelian lahan RS Sumber Waras untuk membangun pusat pengobatan kanker itu dinilai merugikan DKI sebesar Rp191 miliar. Selisih harga tersebut terjadi karena BPK menemukan perbedaan harga NJOP pada lahan di sekitar RS Sumber Waras berbeda dengan lahan rumah sakit itu sendiri. Bedanya antara Rp7 juta dan Rp20 juta/M2. BPK pun sempat mengindikasikan adanya penggelembungan dana.

TELAH DISETUJUI

Wakil Ketua DPRD DKI, Triwisaksana mengakui jika pihaknya telah menyetujui pembelian lahan RS Sumber Waras. Persetujuan itu dilakukan DPRD saat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD Perubahan 2014.

Jadi sebenarnya dewan tidak mempersoalkan hal itu.

Kendati begitu Sani menegaskan, pansus DPRD ini bukan untuk mempermasalahkan soal pembelian lahan RS Sumber Waras. Sebab semua proses pembelian itu memang sudah disetujui oleh DPRD.

"Tapi yang tidak dimengerti DPRD atau pansus itu adalah kenapa tanah yang dibeli itu tanah yang ada di belakang dan menggunakan NJOP tanah yang di depan," tanya Sani. (joko/st)